

MEMBANGUN DESA WISATA KEBANGSAAN DENGAN PENDEKATAN KIPAS (KREATIF, INOVATIF, PARTISIPATIF, DAN KOLABORATIF) MENUJU DESA CERDAS, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN

**Sri Untari¹⁾, Agung Hariyono²⁾, Nindyawati³⁾, Alfian Bramantya⁴⁾,
Kanzenna Kurnia Ashshiddieqy⁵⁾, Aliyah Ardhana Riswari⁶⁾**

^{1,4,5)}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang,

³⁾Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

⁶⁾Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.

sri.untari.fis@um.ac.id

Abstract

The development of tourist villages is a complex challenge and demands an innovative approach oriented towards community participation. This article discusses the experience of Wonorejo Village, Situbondo, in building a "Nationality" tourist village by implementing the KIPAS (Creative, Innovative, Participatory and Collaborative) approach. The main aim of this activity is to create a smart, independent and sustainable tourist village. Meanwhile, the objectives of the activity are 1) Empowering Village Government in building partnerships; 2) Assistance and training for PKK, Karang Taruna, POKDARWIS in merchandise production and home industry; 3) Assistance to BUMDes in managing businesses and managing legal entities; 4) Development of the "Nationality" tourist village model. Methods for implementing socialization about national tourism villages. Facilitation and assistance to village officials in developing partnerships with internal and external stakeholders. Assistance to BUMDes in preparing Strategic Plans. Assistance and training for PKK, Karang Taruna and Pok DARWIS in making merchandise. and development of a national tourist village model to become a smart village, independent and sustainable. The results of the activity reflect significant achievements in strengthening the capabilities of village officials in developing partnerships internally with local stakeholders and externally with universities. BUMDes is a legal entity and is able to make strategic plans. Short and long term. PKK, Karang Taruna and PokDarwis can make merchandise to complete the souvenirs of the national tourist village. The FAN (Creative, Innovative, Participatory and Collaborative) model can be established for the progress of national tourism villages.

Keywords: Wonorejo, national tourist village, KIPAS, smart village.

Abstrak

Pengembangan desa wisata menjadi suatu tantangan yang kompleks dan menuntut pendekatan yang inovatif serta berorientasi pada partisipasi masyarakat. Artikel ini membahas pengalaman Desa Wonorejo, Situbondo, dalam membangun desa wisata "Kebangsaan" dengan menerapkan pendekatan KIPAS (Kreatif, Inovatif, Partisipatif, dan Kolaboratif). Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan desa wisata yang cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan kegiatan adalah 1) Pemberdayaan Pemdes dalam membangun kemitraan; 2) Pendampingan dan pelatihan PKK, Karang Taruna, POKDARWIS dalam produksi merchandise, dan home industry; 3) Pendampingan BUMDes dalam mengelola usaha dan mengurus badan Hukum; 4) Pengembangan model desa wisata "Kebangsaan". Metode pelaksanaan sosialisasi tentang desa wisata kebangsaan. Fasilitasi dan pendampingan perangkat desa dalam pengembangan kemitraan dengan stakeholders internal dan eksternal. Pendampingan BUMDes dalam penyusunan Rencana Strategis. Pendampingan dan pelatihan PKK, Karang Taruna dan Pok DARWIS dalam membuat merchandise. dan pengembangan model desa wisata kebangsaan untuk menjadi desa cerdas (smart village), mandiri berkelanjutan. Hasil kegiatan mencerminkan pencapaian signifikan dalam Penguatan kapabilitas aparat desa dalam mengembangkan kemitraan secara internal

dengan stakeholders lokal dan eksternal dengan perguruan tinggi. BUMDes berbadan Hukum dan mampu membuat rencana strategis. Jangka pendek dan panjang. PKK, Karang Taruna dan PokDarwis dapat membuat merchandise untuk melengkapi cinderamata desa wisata kebangsaan. Model KIPAS (Kreatif, Inovatif, Partisipatif dan Kolaboratif) dapat ditetapkan untuk kemajuan desa wisata kebangsaan.

Keywords: Wonorejo, desa wisata kebangsaan, KIPAS, smart village.

PENDAHULUAN

Desa wisata menjadi bagian integral dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Namun, untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal, pendekatan yang tepat diperlukan. Pendekatan KIPAS mencakup elemen kreativitas, inovasi, partisipasi, dan kolaborasi, yang digabungkan untuk membangun desa wisata yang cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Desa merupakan pilar utama bagi kemajuan negara, dengan keyakinan bahwa kekuatan negara berasal dari kekuatan desa. Desa dianggap sebagai ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam konteks pembangunan desa, terdapat empat aspek yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Abustan, 2022; Rahayu & Saragih, 2022). Peraturan Kementerian Desa Nomor 02 Tahun 2016 mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) menilai kemajuan desa dari tiga dimensi ketahanan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. IDM mengklasifikasikan desa dalam lima status, termasuk Desa Mandiri, yang diartikan sebagai desa dengan pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum yang baik, dan penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif (Fowler & Biekart, 2017; Gamze Erdem Türkelli, 2021). Untuk mencapai status Desa Mandiri, kolaborasi dan jejaring dengan berbagai pihak menjadi kunci, sesuai dengan konsep bahwa pemerintah desa tidak bisa menjadi aktor tunggal. Dalam upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, pemerintah provinsi menerapkan program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Program Desa Berdaya, dan Program Sinau Nang Deso (SINANDO). Pada tahun 2021, enam desa terpilih sebagai desa wisata terbaik, antara lain di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Blitar. Penetapan Wonorejo sebagai desa wisata dapat dipahami melalui dokumen yang relevan (Untari & Suharto, 2020).

Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo berlokasi di bagian timur Kabupaten Situbondo dan mencakup luas wilayah sebesar 414.019 hektar. Desa ini terdiri dari empat dusun, yakni Dusun Randuagung, Dusun Kendal, Dusun Jelun, dan Dusun Pandean. Dikenal sebagai Desa Wisata Kebangsaan, Wonorejo membanggakan pluralisme masyarakatnya, yang menjadi inti identitas dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Toleransi antar umat beragama dijaga dengan cermat, didasarkan pada faktor sejarah desa dan kearifan lokal. Selain itu, Wonorejo juga berperan sebagai desa penyangga untuk Taman Nasional Baluran, yang

memiliki fungsi vital sebagai kawasan perlindungan sumber daya alam dan ekosistemnya, mendukung potensi wisata berkelas internasional. Potensi Wonorejo mencakup hal-hal berikut.

Tabel 1 Potensi Wisata Desa Wonorejo

Sumber : diolah tim pelaksana

Potensi wisata yang dimiliki	Pengembangan wisata	
	Komoditas	Wisata
Sumber daya alam	1. Sumber air 2. Pantai parengan Hutan	1. Wisata alam 2. Wisata alam Bumi perkemahan, tempat selfi, petualangan
Situs Sejarah	1. Situs mbah Pande 2. Situs mbah jelun Situs candi bang	Sejarah .religi
Pertanian	1. Jagung 2. Sayuran Padi	Wisata minat khusus yakni menjadi kampung petik jagung, petik sayuran, bisa jadi wisata edukasi
Home Industri	<ul style="list-style-type: none"> • nata de coco • pemindangan ikan laut • olahan susu 	Wisata edukasi, bagaimana membuat nata de coco, yogurt, memindang ikan laut
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenian local • Kuda lumping • Tari jaring kambang • Hadrah kuntulan • Karawitan • Upacara tumpeng sewu 	

-
- Tumpeng sewu
-

Penetapan sebagai desa wisata kebangsaan menimbulkan tuntutan bagi Pemerintah Desa Wonorejo untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan jati diri "kebangsaan" yang membedakannya dari desa wisata lainnya. Meskipun menjadi suatu tantangan tersendiri, hal ini terkait dengan belum adanya penemuan karakteristik dan keunikan yang khas. Pemerintah Desa tidak dapat berperan sendirian, melainkan memerlukan kemitraan dengan pihak lain. Model kemitraan multi pihak saat ini dianggap sebagai transformasi peran dan interaksi antara pemerintah lokal, akademisi, perguruan tinggi, dan sektor bisnis/swasta. Dalam konteks ini, teori Triple Helix oleh Etzkowitz & Leydesdorff tahun 1990-an, yang mengaitkan akademisi, industri, dan pemerintah sebagai kondisi optimal untuk inovasi, menjadi acuan. Pendekatan ini, dikenal sebagai *Multi Stakeholder Partnerships* (MSP), dianggap strategis dalam pengembangan desa wisata untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sejak Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan Desa Wonorejo sebagai "Desa Wisata Kebangsaan" pada 2 Mei 2015, terjadi kolaborasi dengan Universitas Negeri Malang (UM) melalui program KKN, PKM-M, dan bina desa. Kolaborasi ini melibatkan Fakultas Ilmu Sosial dalam upaya merealisasikannya. Penetapan Wonorejo sebagai desa wisata kebangsaan didasarkan pada potensi dan modal sosial yang kuat, termasuk kerukunan antar umat beragama dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Desa ini diharapkan

menjadi model keberagaman yang indah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wonorejo memiliki potensi sebagai komoditas wisata unggulan. Pengabdian kepada Masyarakat dengan dana DRPM berhasil mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan perempuan desa, menghasilkan desain desa wisata kebangsaan. Pada tahun 2020, Pemerintah Desa menetapkan BUMDes Wonorejo sebagai pengelola desa wisata kebangsaan, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam hal dana, SDM, dan pembangunan kemitraan. Program Kreativitas Mahasiswa-Masyarakat (PKM-M) pada tahun 2020, sebagai langkah lanjutan dari kerja sama dengan FIS UM, berkontribusi pada penguatan pemuda dan organisasi kemasyarakatan di desa, termasuk pembuatan *website* desa Wonorejo kebangsaan dengan ikon "WOKE" dan penyusunan agenda kegiatan wisata. Meskipun harapan perkembangan desa wisata terhenti akibat pandemi Covid-19, BUMDes belum sepenuhnya dapat memanfaatkan modal sosial untuk pengembangan lebih lanjut.

Desa Wonorejo, berkat kerja sama dengan peneliti dari Universitas Negeri Malang (UM), tidak hanya memiliki potensi yang teridentifikasi tetapi juga nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai daya tarik destinasi. Potensi ini melibatkan keindahan dan keunikan alam, seperti hutan, pantai, dan sumber air bersih, serta sektor pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam. Selain itu, desa ini juga kaya dengan keunikan tradisi dan budaya. Meskipun demikian, pengembangan desa wisata memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam semua tahap pengembangan, mulai dari perencanaan, implementasi,

hingga pengawasan (Dewi, 2013). Saat ini, kerja sama multi pihak menjadi kebutuhan penting dalam mengembangkan desa wisata untuk meningkatkan produksi cinderamata, oleh-oleh, atraksi, dan memodelkan desa wisata "KEBANGSAAN". Tim pelaksana hadir sebagai fasilitator dan pendamping untuk membimbing desa menuju status desa wisata yang cerdas (*Smart Village*), mandiri, dan berkelanjutan.

Tujuan kegiatan meliputi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola desa wisata Kebangsaan; meningkatkan produktivitas *mercandise*, kemampuan memasarkan secara digital. Mendampingi mengurus badan hukum BUMDes, penguatan kemampuan Pemdes dalam bermitra multipihak. Jika dikaitkan dengan IKU ada 2 IKU yang akan dicapai yakni : IKU 2 yakni mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dan IKU butir 3 yakni dosen berkegiatan di luar kampus. Fokus kegiatan meliputi: 1). Pemberdayaan Pemdes dalam membangun kemitraan, 2). Pendampingan dan pelatihan PKK, Karang Taruna, POKDARWIS dalam produksi *merchandise*, dan *home industry*. 3). Pendampingan BUMDes dalam mengelola usaha dan mengurus badan Hukum. 4). Pengembangan model desa wisata "Kebangsaan"

METODE

Metode yang digunakan adalah partisipatif aktif, dengan fokus pada keterlibatan sepenuhnya dari peserta dalam proses pendampingan, bukan melalui metode ceramah. Peserta didorong untuk mencari, menemukan, dan mendapatkan pengetahuan/keterampilan yang dibutuhkan. Dengan demikian, terjadi

perubahan dalam cara pelaksanaan pengabdian pada masyarakat kali ini, di mana bukan Tim pelaksana yang memberikan kontribusi kepada desa dalam pengembangan desa wisata, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh desa untuk mengembangkan desa wisata secara nasional. Dengan memulai dari kebutuhan desa, diharapkan akan tercipta kelangsungan pembangunan di masa yang akan datang (pembangunan yang berkelanjutan). Ini berarti bahwa setelah kegiatan pengabdian pada masyarakat selesai, masyarakat akan dapat melanjutkan upaya membangun desa wisata secara mandiri (Corina, 2018; Lane & Kastenholz, 2015).

Tim pelaksana menyampaikan informasi secara singkat dan dilanjutkan dialog terkait dengan pengembangan desa wisata. Tim pelaksana sebagai fasilitator tidak memberikan informasi/isi materi tetapi memberikan rangsangan-rangsangan sebagai bahan diskusi agar peserta mampu menemukan dan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara konstruktivisme. Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian ijin melaksanakan pengabdian pada masyarakat dari Kepala desa sasaran. Selanjutnya dilaksanakan perencanaan kegiatan bersama pemerintah desa, rekrutmen anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang didampingi, menetapkan strategi pelaksanaan, eksekusi pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dan penyusunan laporan.

Tim pelaksana bertindak sebagai fasilitator terkait dengan pengembangan desa wisata. Tim pelaksana sebagai fasilitator tidak bersifat menggurui tetapi memberikan rangsangan-rangsangan sebagai bahan diskusi agar peserta mampu menemukan dan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara konstruktivisme.

Tahapan kegiatan dapat dideskripsikan berikut:

1. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan Desa Wisata Kebangsaan. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antara pengembang dan semua pemangku kepentingan terkait dengan rencana pengembangan Desa Wisata Kebangsaan. Sosialisasi melibatkan pertemuan-pertemuan, lokakarya, atau forum terbuka di mana ide dan visi pengembangan desa wisata dibagikan secara terbuka. Materi sosialisasi juga mencakup informasi tentang konsep "Desa Cerdas" dan bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam konteks desa wisata Kebangsaan Wonorejo (Muazir et al., 2020; Santaiarea, 2016). Pada tahap ini, partisipasi masyarakat sangat diutamakan untuk memastikan bahwa aspirasi dan masukan dari tingkat bawah juga menjadi bagian dari perencanaan.

2. Tahap Fasilitasi

Tahap fasilitasi dimulai untuk membantu pengembang dalam merumuskan rencana pengembangan Desa Wisata Kebangsaan yang lebih rinci. Fasilitator atau tim pengembangan dapat membantu dalam memfasilitasi diskusi dan perencanaan, menggali ide-ide kreatif, serta membantu pengembangan rencana strategis. Bagian penting dari fasilitasi adalah penguatan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai motor penggerak pembangunan desa wisata. tahap berikutnya tahap pengembangan *siteplan* sebagai salah satu langkah penting dalam tahap ini adalah pengembangan *siteplan* yang mencakup rencana tata letak dan infrastruktur desa wisata. *Siteplan* harus mencakup

informasi tentang lokasi objek wisata, fasilitas pendukung, aksesibilitas, dan tata ruang yang memadai.

3. Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan dilakukan dengan pelatihan Aparat Desa. *Pertama*, Melalui pendampingan, aparat desa diberikan pelatihan untuk membantu mereka memahami dan mengelola perjanjian kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, seperti pengusaha lokal, investor, dan LSM. Pelatihan juga mencakup manajemen keuangan dan administrasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan Badan Usaha Masyarakat Desa wisata. *Kedua*. Pendampingan BUMDes. BUMDes didampingi dalam menyusun rencana strategis pengembangan unit usaha yang akan menjadi bagian integral dari program Desa Wisata Kebangsaan. Rencana strategis ini mencakup diversifikasi usaha, pemasaran, manajemen risiko, dan pemantauan kinerja.

Pendampingan dilakukan dalam pengembangan *merchandise* khas, pendampingan dilakukan pada PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, dan Pokdarwis dalam mengembangkan *merchandise* khas yang dapat dijual kepada wisatawan. *Merchandise* ini dapat berupa produk-produk lokal, kerajinan tangan, atau suvenir yang memperkaya pengalaman wisatawan dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir adalah tahap *monitoring* dan evaluasi. Tahap ini dilakukan dengan memonitoring, kegiatan pengembangan dan pengelolaan Desa Wisata Kebangsaan dipantau secara berkala. Hal ini

melibatkan pemantauan kinerja BUMDes, keberlanjutan produk dan layanan, serta partisipasi masyarakat dalam program desa wisata. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dari strategi dan program yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan Desa Wisata Kebangsaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Pemdes dalam Membangun Kemitraan

Hasil kegiatan pengabdian mencerminkan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pemerintah Desa di Wonorejo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota pemerintahan desa dalam mengelola administrasi desa, perencanaan pembangunan, dan manajemen sumber daya lokal. Terlihat peningkatan hubungan antara Pemerintah Desa dengan *stakeholders*, meskipun belum melibatkan berbagai pihak. Paguyuban pemilik *homestay*, industri rumahan, dan pengelola wisata Taman Nasional Baluran menjadi mitra bagi pemerintah desa.

Hasil kegiatan ini juga telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat, di mana Pemerintah Desa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat mencakup pertemuan rutin, konsultasi publik, atau forum partisipatif untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam kebijakan desa.

Langkah-langkah ini sejalan dengan temuan Biekart dan Fowler tahun 2018 menyatakan bahwa peningkatan peran pemerintah desa

yang didukung oleh partisipasi masyarakat dapat mengoptimalkan potensi desa sebagai kekuatan dalam pembangunan desa. Hasil penelitian Hasyemi Rafsanjani dkk pada tahun 2013 menyatakan kolaborasi antara LPMD dan Kepala Desa dalam merencanakan pembangunan dimaksudkan untuk menggalang perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di pedesaan. Tujuannya adalah untuk mendorong kerja sama di wilayah tersebut, mempromosikan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Kemampuan menyelenggarakan kemitraan dengan *stakeholders* penting dimiliki oleh Pendes Wonorejo, karena akan mendukung Pembangunan desa (Raman et al., 2015; Untari, 2016; Widiyanto, 2019) yang pada akhirnya mengatasi kemiskinan dan menjadikan desa mandiri berkelanjutan.

Pendampingan dan Pelatihan PKK, Karang Taruna, POKDARWIS Dalam Produksi *Merchandise*, dan *Home Industry*

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa di Desa Wonorejo, Situbondo, pendampingan dan pelatihan untuk PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan produksi *merchandise* dan *home industry*. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis, pemahaman pasar, dan dukungan teknis kepada anggota kelompok tersebut. Melalui pelatihan ini, PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS dapat meningkatkan kemampuan produksi mereka dalam menciptakan berbagai produk *merchandise*, seperti kerajinan tangan, tekstil, atau makanan khas lokal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Syarifudin et al., 2023) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan

pada setiap waktu kegiatan yang di agendakan pada aspek Pariwisata 4A (*Attractions, Aecessibility, Amenity, Ancillary*), terhadap pemahaman mitra terkait materi yang disampaikan. Pendampingan ini juga fokus pada peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen usaha yang baik.

Pendampingan juga melibatkan konsep *home industry* untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti bahan baku dan tenaga kerja lokal, PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS dapat menciptakan produk berkualitas tinggi dengan identitas desa yang khas. (Herdiana, 2019). Pendampingan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis produksi, tetapi juga memberikan wawasan tentang pengelolaan keuangan, pemasaran *online*, dan pengembangan merek, sebagaimana gambar berikut



Gambar 1. Kegiatan pelatihan pembuatan *merchandise*

Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kelompok, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong perkembangan ekonomi lokal. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat membantu membangun jaringan kerja sama antara kelompok-kelompok ini, menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan di Desa Wonorejo. Pendekatan holistik ini mencerminkan komitmen untuk memajukan potensi ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan usaha lokal.

Pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek teknis dan ekonomi semata. Mereka juga menekankan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Selaras dengan hasil penelitian bahwa pengembangan dan pengelolaan pariwisata berdasarkan komunitas mendorong terciptanya peluang kerja pada sektor pariwisata (Lee & Jan, 2019; Mahanani & Listyorini, 2021). Program ini mendorong praktik produksi yang ramah lingkungan, mendukung penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan, dan mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap produk yang dihasilkan. Selain itu, pendampingan juga mencakup pelatihan tentang tanggung jawab sosial dan keterlibatan komunitas. PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil pelatihan kerajinan kaos sablon buatan peserta



Gambar 2. Produk *Merchandise* Kaos “WOKE” Wonorejo Kebangsaan

Pendampingan Bumdes dalam Mengelola Usaha Dan Mengurus Badan Hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapatkan pendampingan menyeluruh dalam mengelola operasional mereka dan menjalankan proses hukum mereka. Program pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas BUMDes, memungkinkan mereka untuk efektif mengelola potensi ekonomi desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan usaha, BUMDes mendapatkan dukungan dalam menyusun perencanaan bisnis yang terinci, melakukan analisis risiko, dan menetapkan target keuangan. Aspek lain dari pendampingan melibatkan manajemen produksi, pengelolaan persediaan, serta peningkatan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Tidak hanya itu, pendampingan juga menitikberatkan pada aspek hukum dan administratif. BUMDes mendapat bantuan dalam proses pendirian dan pengelolaan badan hukum, termasuk pemahaman dan pemenuhan persyaratan peraturan yang berlaku. Kepatuhan hukum, seperti perpajakan, perlindungan konsumen, dan ketentuan lingkungan, menjadi bagian integral dari upaya pendampingan ini. Hal ini sedikit berbeda dengan Agunggunanto dan Kushartono pada tahun 2016 bahwa dalam hal keuangan dan akuntansi, BUMDes dibimbing dalam penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran, dan manajemen keuangan secara keseluruhan. Bantuan juga diberikan terkait pengelolaan dana desa agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Upaya pemasaran dan penjualan produk atau layanan BUMDes diberikan perhatian khusus, dengan penyusunan strategi pemasaran yang efektif dan diversifikasi produk. Tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga mencakup

pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui pelatihan karyawan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam mengelola usaha serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Hal ini sejalan dengan hasil riset tentang BUMDes yang menyatakan bahwa BUMDes belum berjalan dengan baik, disebabkan oleh jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka (Agunggunanto & Kushartono, 2016.) Dengan bantuan pendampingan ini, diharapkan BUMDes di Desa Wonorejo dapat tumbuh dan berkembang sebagai entitas ekonomi yang kuat, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan menjadi model keberlanjutan di tingkat desa.

Pengembangan Model Desa Wisata “Kebangsaan”

Hasil pengabdian menunjukkan Desa Wonorejo, Situbondo, memandang potensi besar dalam pengembangan model desa wisata "Kebangsaan" dengan mengadopsi pendekatan KIPAS (Kreatif, Inovatif, Partisipatif, dan Kolaboratif). Pendekatan ini menjadi landasan untuk menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga berkelanjutan, melibatkan aktif partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Aspek kreatif diwujudkan melalui pengembangan ide-ide unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal Desa Wonorejo. Dengan melibatkan seniman dan budayawan lokal, desa dapat menciptakan atraksi yang menggabungkan unsur seni, pertunjukan tradisional, dan kerajinan

tanah khas daerah dan melestarikan kearifan lokal (Wesnawa, 2022).

Penerapan inovasi dapat terlihat dalam penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, seperti aplikasi panduan wisata atau peta digital interaktif. Hal ini sedikit berbeda dengan temuan (Untari, 2016; Untari & Wantoro, 2018) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi belum optimal, sehingga pendekatan *Triplehelix, quadruple helix* belum mampu mengungkit spirit usaha masyarakat desa. Pendekatan KIPAS telah membawa perubahan positif dalam pengembangan Desa Wisata Kebangsaan. Masyarakat lokal menjadi lebih terlibat dan berperan aktif dalam pengelolaan desa wisata, sementara pemerintah desa meningkatkan kemampuan administratif dan manajerial mereka. Hasil ini juga menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya tarik desa wisata bagi wisatawan. Langkah selanjutnya adalah menjaga dan mengembangkan hasil-hasil ini secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi terus-menerus.

Model pengembangan desa wisata kebangsaan dengan pendekatan KIPAS, adalah pertama. **Kreatif.** Dalam konteks pengembangan model desa wisata "Kebangsaan" di Wonorejo, pendekatan kreatif memainkan peran penting dalam menghadirkan daya tarik yang unik dan membedakan destinasi tersebut dari yang lain. Kreativitas diimplementasikan dalam berbagai aspek, mulai dari desain arsitektur bangunan, seni pertunjukan, hingga pengembangan produk dan layanan wisata. Desa Wonorejo diarahkan untuk menjadi pusat kreativitas yang merangkul kearifan lokal dan menghadirkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Sebagaimana pandangan Alfian yang dikutip (Swesti et al., 2020)

yang menyatakan bahwa dalam pariwisata kreatif bukan hanya terkait dengan *something to see, something to buy, dan something to do* tetapi berhubungan juga dengan *something to learn* dan *something to feel*.

Pada segi arsitektur, desa wisata Wonorejo kebangsaan dirancang dengan sentuhan seni dan desain yang mencerminkan kekayaan budaya lokal, seperti museum kebangsaan. Penggunaan warna-warna cerah, motif-motif tradisional, dan integrasi elemen alam setempat dapat menciptakan atmosfer yang memesona dan mengundang minat wisatawan. Selain itu, seni pertunjukan lokal seperti tarian tradisional, musik, dan teater bisa diintegrasikan dalam agenda kegiatan rutin, memberikan pengalaman budaya yang mendalam kepada pengunjung. Seperti gelas budaya “Tumpeng Sewu” berikut:

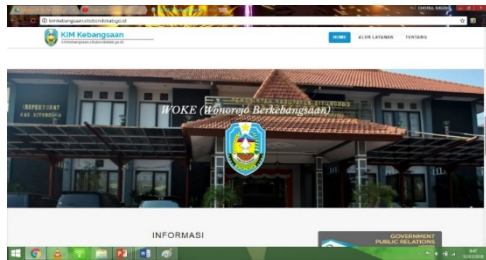


Gambar 3. Suasana Pagelaran Tumpeng Sewu

Kreativitas juga dapat diekspresikan melalui pengembangan produk dan layanan unik. Misalnya, pengembangan kerajinan tangan lokal dengan desain modern yang tetap mengakar pada tradisi setempat, atau penciptaan menu makanan khas dengan sentuhan inovatif. Pelibatan seniman lokal dan pelaku usaha kreatif dalam pengembangan produk dan layanan ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi komunitas setempat.

Pentingnya kreativitas juga dapat tercermin dalam upaya pemasaran dan promosi. Kampanye kreatif, penggunaan media sosial dengan konten yang menarik, dan kolaborasi dengan *influencer* atau komunitas *traveler* dapat membantu meningkatkan visibilitas desa wisata "Kebangsaan" Wonorejo, menarik minat wisatawan potensial, dan memperluas dampak positif terhadap perekonomian dan keberlanjutan lokal. Dengan memanfaatkan kreativitas dalam setiap langkah pengembangan, desa wisata ini memiliki potensi untuk menjadi destinasi yang memukau dan berkesan bagi setiap pengunjung.

Inovatif. Dalam konteks pengembangan model desa wisata "Kebangsaan" di Wonorejo, pendekatan inovatif dalam menghadirkan solusi yang cerdas dan modern untuk memajukan destinasi wisata. Inovasi diimplementasikan dalam berbagai aspek, dari manajemen destinasi hingga teknologi yang diterapkan untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Salah satu aspek inovatif dapat terlihat dalam penggunaan teknologi modern untuk mempermudah akses dan pengelolaan destinasi. Penggunaan aplikasi seluler yang memberikan informasi *real-time*, pemandu wisata *virtual*, atau sistem reservasi *online* dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengunjung. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan atau sistem manajemen limbah yang cerdas, dapat memperkuat citra desa wisata "Kebangsaan" sebagai destinasi yang berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan dengan membuat web Desa wisata kebangsaan sebagai berikut.



Gambar 4. Website Desa Wisata Kebangsaan

Aspek inovatif juga dapat tercermin dalam pengembangan kegiatan wisata yang unik dan menarik. Misalnya, penggunaan teknologi realitas *virtual* atau *augmented reality* dalam tur interaktif yang menggabungkan unsur budaya dan sejarah setempat, memberikan pengalaman yang mendalam kepada pengunjung. Demikian juga, pengembangan paket wisata yang menggabungkan petualangan alam, pendidikan budaya, dan interaksi langsung dengan komunitas lokal dapat menjadi inovasi dalam menarik berbagai segmen wisatawan. Selain itu, keberlanjutan inovatif juga dapat mencakup pengembangan program pelatihan dan pengembangan bagi penduduk lokal. Ini bisa melibatkan pelatihan dalam bidang teknologi, keahlian kreatif, atau pengembangan keterampilan bisnis untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemasaran desa wisata.

Dengan menerapkan pendekatan inovatif ini, desa wisata "Kebangsaan" di Wonorejo dapat terus berkembang, tetap relevan, dan menjadi contoh inspiratif bagi destinasi wisata lainnya. Inovasi tidak hanya memberikan nilai tambah dalam hal pengalaman wisata, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian warisan budaya.

Aspek partisipatif. Partisipatif sebagai landasan utama untuk menciptakan destinasi yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat

setempat. Partisipatif mencerminkan keterlibatan aktif dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk penduduk lokal, stakeholder, dan komunitas sekitar, dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan terkait destinasi wisata. Penduduk setempat di Wonorejo diundang untuk berpartisipasi secara langsung dalam perumusan visi dan misi desa wisata. Melalui dialog terbuka, pertemuan partisipatif, dan forum komunitas, mereka dapat mengemukakan aspirasi, kebutuhan, dan ide-ide untuk pengembangan desa wisata yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan lingkungan. Partisipatif juga tercermin dalam pengelolaan harian desa wisata. Penduduk setempat dapat terlibat dalam kegiatan pemasaran, menjalankan *homestay* atau warung makan, dan menyediakan produk dan layanan wisata. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemangku kepentingan aktif yang turut mendukung perkembangan desa mereka.

Selain itu, partisipatif mencakup pemberdayaan komunitas melalui pelatihan dan pendidikan. Inisiatif ini dapat mencakup peningkatan keterampilan dalam hal manajemen usaha kecil, pengembangan kerajinan tangan, atau pemeliharaan lingkungan. Melalui penguatan kapasitas komunitas, mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola dan mengambil manfaat dari potensi pariwisata di lingkungannya.

Partisipatif juga membuka ruang bagi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, desa wisata "Kebangsaan" dapat mengoptimalkan sumber daya dan mendukung keberlanjutan proyek secara lebih luas. Secara keseluruhan, aspek

partisipatif membangun dasar yang kuat untuk kesuksesan desa wisata "Kebangsaan" di Wonorejo. Melibatkan masyarakat setempat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pihak yang terlibat secara aktif, dapat menciptakan iklim berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan positif dalam jangka panjang.

Aspek kolaborasi. Dalam pengembangan model desa wisata "Kebangsaan" di Wonorejo, aspek kolaborasi memainkan peran krusial dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang kokoh dan berkelanjutan. Kolaborasi melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku bisnis lokal, masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan sektor pendukung lainnya, untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan desa wisata. Kolaborasi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum atau badan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam forum ini, berbagai ide, sumber daya, dan pandangan dapat dipertukarkan, menciptakan ruang untuk diskusi terbuka dan pengambilan keputusan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dapat membentuk tim kerja atau kelompok fokus untuk mengatasi tantangan tertentu dan merencanakan strategi bersama.

Pelaku bisnis lokal dapat terlibat dalam kolaborasi dengan cara mengintegrasikan produk dan layanan mereka ke dalam pengalaman wisata desa. Misalnya, pengusaha makanan dapat menyediakan hidangan lokal khas, sementara pengrajin lokal dapat menyumbangkan karya seni atau kerajinan tangan mereka untuk dijual sebagai suvenir. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis lokal, tetapi

juga memperkaya pengalaman wisatawan.

Kolaborasi juga dapat melibatkan dukungan dari pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, universitas, atau organisasi non-profit. Mereka dapat memberikan sumber daya finansial, pengetahuan, atau keahlian khusus yang mendukung pengembangan desa wisata. Pihak eksternal juga dapat berperan dalam pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka terkait pengelolaan pariwisata. Wujud kolaborasi ini mungkin belum sampai pada 5 indikator sebagaimana hasil penelitian (Maulia & Setiyono, 2023) kolaborasi yang telah dilaksanakan berhasil dibuktikan melalui lima (5) indikator yang telah terpenuhi. Indikator tersebut mencakup Dialog tatap muka (*Face to face dialog*), Membangun kepercayaan (*Trust Building*), Komitmen pada proses (*Commitment to process*), Berbagi pemahaman (*Sharing understanding*), dan Hasil sementara (*Intermediate outcomes*). Kesuksesan kolaborasi dapat dilihat dari terlaksananya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan pencapaian hasil sementara yang dapat diukur. Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, kolaborasi melibatkan pembangunan kemitraan dengan sektor swasta, seperti perusahaan perjalanan atau operator wisata. Dengan berkolaborasi dengan sektor ini, desa wisata dapat mendapatkan dukungan dalam hal pemasaran, distribusi, dan pengembangan paket wisata yang menarik. Dengan memaksimalkan aspek kolaborasi ini, desa wisata "Kebangsaan" di Wonorejo dapat

memanfaatkan kekuatan bersama untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan, menguntungkan, dan memberdayakan masyarakat setempat. Kolaborasi menciptakan sinergi yang melibatkan berbagai kepentingan dan dapat menjadi kunci kesuksesan dalam menghadirkan pengalaman wisata yang komprehensif dan berkesan. Wujud kolaborasi *multistakeholders* dengan pembuatan kalender *event* berikut.



Gambar 4 Kalender Event Pariwisata

SIMPULAN

Pemerintah Desa di Wonorejo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota pemerintahan desa dalam mengelola administrasi desa, perencanaan pembangunan, dan manajemen sumber daya lokal. Meskipun belum melibatkan berbagai pihak, terlihat peningkatan hubungan antara Pemerintah Desa dengan *stakeholders*. Paguyuban pemilik *homestay*, industri rumahan, dan pengelola wisata Taman Nasional Baluran menjadi mitra bagi Pemerintah desa Wonorejo.

Pendampingan dan pelatihan dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan kelompok, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Desa Wonorejo. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat membantu

membangun jaringan kerja sama antara kelompok-kelompok ini, menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan holistik ini mencerminkan komitmen untuk memajukan potensi ekonomi masyarakat setempat melalui pengembangan keterampilan dan pemberdayaan usaha lokal. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan ekonomi semata. Mereka juga menekankan nilai-nilai sosial dan keberlanjutan lingkungan. Program ini mendorong praktik produksi yang ramah lingkungan, mendukung penggunaan bahan baku lokal yang berkelanjutan, dan mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap produk yang dihasilkan. Selain itu, pendampingan juga mencakup pelatihan tentang tanggung jawab sosial dan keterlibatan komunitas. PKK, Karang Taruna, dan POKDARWIS didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan upaya pemberdayaan masyarakat.

BUMDes menerima pendampingan menyeluruh dalam mengelola operasional dan menjalankan proses hukum mereka dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas mereka. Program pendampingan ini dirancang untuk memungkinkan BUMDes efektif mengelola potensi ekonomi desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal pengelolaan usaha, BUMDes diberikan dukungan untuk menyusun perencanaan bisnis yang terinci, melakukan analisis risiko, dan menetapkan target keuangan. Pendampingan juga mencakup aspek manajemen produksi, pengelolaan persediaan, dan peningkatan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, pendampingan ini

menitikberatkan pada aspek hukum dan administratif. BUMDes diberikan bantuan dalam proses pendirian dan pengelolaan badan hukum, termasuk pemahaman dan pemenuhan persyaratan peraturan yang berlaku. Kepatuhan hukum, seperti perpajakan, perlindungan konsumen, dan ketentuan lingkungan, diintegrasikan sebagai bagian penting dari upaya pendampingan. Dalam hal keuangan dan akuntansi, BUMDes mendapat bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran, dan manajemen keuangan secara menyeluruh. Bantuan juga diberikan terkait pengelolaan dana desa agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Desa Wonorejo, Situbondo, mengidentifikasi potensi besar dalam pengembangan model desa wisata "Kebangsaan" dengan mengadopsi pendekatan KIPAS (Kreatif, Inovatif, Partisipatif, dan Kolaboratif). Pendekatan ini menjadi dasar untuk menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait. Aspek kreatif diwujudkan melalui pengembangan ide-ide unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal Desa Wonorejo. Dengan melibatkan seniman dan budayawan lokal, desa dapat menciptakan atraksi yang menggabungkan unsur seni, pertunjukan tradisional, dan kerajinan tangan khas daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas pemberian dana yang diberikan melalui Program Hibah Ditjen Diktiristek melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada

Masyarakat (DRTPM) Berkat dukungan ini, kami dapat menjalankan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan sukses sesuai harapan. Kami juga ingin menyatakan penghargaan kami kepada Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, (LPPM) Universitas Negeri Malang atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tak lupa kami sangat menghargai Pemerintah Daerah Situbondo, khususnya Pemerintah Desa Wonorejo. Kecamatan Banyuputih, Situbondo beserta semua tokoh Masyarakat dan PKK, Karang Taruna dan POKDARWIS yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan pengabdian ini bermakna dan bermanfaat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan, A. (2022). Aspek – Aspek Penting Membangun Kehidupan di Desa Menuju Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(1), 32–46.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19362>
- Agunggunanto, E. Y., & Kushartono, E. W. (n.d.). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)* Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.
- Biekart, K., & Fowler, A. (2018). Ownership dynamics in local multi-stakeholder initiatives. *Third World Quarterly*, 39(9), 1692–1710.
<https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1450139>
- Corina, G. (2018). Rural Tourism an

- Opportunity for Development. *Revista de Turism - Studii Si Cercetari in Turism*, 26, 59–62. <https://widgets.ebscohost.com/prod/customerspecific/ns000290/authentication/index.php?url=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26db%3Dedb%26AN%3D135377536%26amp%3Blang%3Dpt-pt%26site%3Dedslive%26scope%3Dsite>
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Fowler, A., & Biekart, K. (2017). Multi-Stakeholder Initiatives for Sustainable Development Goals: The Importance of Interlocutors. *Public Administration and Development*, 37(2), 81–93. <https://doi.org/10.1002/pad.1795>
- Gamze Erdem Türkelli. (2021). Children's Rights and Business: Governing Obligations and Responsibility (Cambridge: Cambridge University Press, 2020). *Business and Human Rights Journal*, 6(3), 616–620. <https://doi.org/DOI:10.1017/bhj.2021.20>
- Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, S. (n.d.). *KEMITRAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DENGAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)* Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, Suwondo. *I(4)*, 67–72.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. *IPTEK-KOM*, 21.
- Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: the evolution of practice and research approaches – towards a new generation concept? *Journal of Sustainable Tourism*, 23. [tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2015.1083997?scroll=top&needAccess=true&role=tab](https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1083997?scroll=top&needAccess=true&role=tab)
- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of the sustainability. *Tourism Management*, 70(September 2018), 368–380. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.09.003>
- Mahanani, Y. P., & Listyorini, H. (2021). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di desa wisata cempaka, bumijawa, kabupaten tegal. *Ekonomi*, 2013, 181–188.
- Maulia, E. I., & Setiyono. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 13.
- Muazir, S., Lestari, L., Alhamdani, M. R., & Nurhamsyah, M. (2020). Menuju Desa Cerdas Perbatasan: Survey Kesiapan Desa Cerdas. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 16(2), 120–135.

- <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i2.27417>
- Rahayu, S., & Saragih, M. G. (2022). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan* (B. Aditi & A. F. Rahma (eds.)). Tungga Esti.
- Raman, Malik, I., & Hamrun. (2015). *Kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di desa tongke-tongke. V(2)*.
- Santaiarea. (2016). *Desa Wisata Kebangsaan*.
<http://www.santaiarea.com/2016/08/desa-wisata-kebangsaan.html>
- Swesti, W., Soeprihanto, J., & Widiyastuti, D. (2020). Model Pengembangan Pariwisata Kreatif untuk Mencapai Keberlanjutan di Desa Wisata Kasongan. *Jurnal Kawistara, 10(3)*, 295.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.44157>
- Syarifudin, D., Ishak, R. F., Firmansyah, Pirngadi, B. H., Dior, R. D. P., Hermawan, R. S., Nurwulandari, F. S., Herlina, E., & Universitas. (2023). *PENDAMPINGAN POKDARWIS DAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG. 5(September)*, 1505–1519.
- Untari, S. (2016). Public-Private Partnerships in Improving the Quality of Education for the Poor in Indonesia. *Public Policy and Administration Research, 6(6)*, 65–72.
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/31414>
- Untari, S., & Suharto, Y. (2020). The Development of Youth and Woman Entrepreneurship. *GeoJournal of Tourism and Geosites, 33(4)*, 1538–1544.
<https://doi.org/10.30892/gtg.3>
- Untari, S., & Wantoro, M. (2018). *Woke! “Wonorejo Berkebangsaan” Rintisan Desa Bhineka Tunggal Ika Sebagai Wahana Edukasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal) dalam Rangka Pencapaian Program Nawa Cita*.
- Wesnawa, I. G. A. (2022). Pengembangan Pariwisata Perdesaan Bali: Integrasi Potensi, Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 11(1)*, 149–160.
<https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.44184>
- Widianto, B. (2019). *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan*.